



PEMERINTAHAN KOTA SERANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SERANG TAHUN 2021**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SERANG**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. Atas limpahan rahmat dan karunianya kita tak henti-hentinya diberikan banyak nikmat, baik nikmat panjang umur, nikmat sehat maupun nikmat kesempatan, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai abdi Negara maupun abdi masyarakat yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan dan kemasyarakatan. Solawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar MUHAMMAD Saw. Beserta keluarganya, sahabatnya dan kita sekalian sebagai umatnya yang selalu konsisten terhadap ajarannya, Amin

Pada prinsipnya rencana kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun anggaran 2021 ini menyajikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, evaluasi kinerja tahun lalu, strategi kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja dan kelompok sasaran. Strategi kebijakan program dan indikasi kegiatan adalah untuk mendukung proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang pada khususnya serta mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju kota peradaban yang berdaya dan berbudaya.



Dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pengembangan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan maka pemerintah telah menetapkan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional yang dalam satu materinya mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun sistem perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJP daerah, RPJM daerah dan Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD sebagai dokumen perencanaan 1 (satu) tahun.

Serang, 15 September 2021

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA SERANG

DIAT HERMAWAN, SST, M.Si

NIP. 19760426 200112 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	10
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	11
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	19
3.3. Program dan Kegiatan	20
BAB IV PENUTUP	22



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Sementara itu parallel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Serang tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan



pembangunan melalui musrembang tahunan yang diselenggarakan secara berjangjang untuk keterpaduan rencana kerja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang sebagai organisasi perangkat daerah pada tahun 2021 ini menyusun rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Serang tahun anggaran 2021. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Serang tahun 2021 seperti yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Serang tahun 2018 – 2023 yaitu :

"TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA"

Pada MISI KEDUA (2) yaitu : **MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang dalam operasionalnya akan mengacu kepada rencana strategis dan mengarahkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada, baik sumber daya manusia maupun pendukung lainnya dengan memperhatikan kekuatan dan



kelemahan yang akan dimuat dalam RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang.

Sebagai pelaksana Pemerintah Daerah Kota Serang di bidang Penanggulangan Bencana dalam menjalankan kegiatan dan programnya akan selalu berlandaskan kepada Misi Kota Serang sebagai arah dan tuntunan untuk mencapai tujuan Kota Serang sebagai penjabaran Visi Kepala Daerah.

Rencana kerja (Renja) Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun 2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Serang tahun 2021 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun 2021 adalah :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Propinsi Banten



4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang pembentukan Struktur Organisasi BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun 2021 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai landasan pembangunan tahunan Kota Serang, dan untuk terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar Kelurahan, Kecamatan, OPD serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun 2021 adalah sebagai berikut :



1. Terwujudnya penjabaran rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) kota Serang tahun 2021
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar kelurahan, Kecamatan, sector dan antar fungsi disemua tingkatan pemerintahan
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan , penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari penyusunan rencana kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan rencana kerja agar substansi pada bab-bab berikut dapat dipahami, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Memuat data dan informasi tentang evaluasi pelaksanaan renja, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat tentang talaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja dan program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan tentu harus adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu/tahun sesudahnya, evaluasi dimaksud sebagai gambaran atau parameter untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dalam menentukan kebijakan tahun kedepan dalam penanggulangan bencana BPBD tidak salah arah dan sasaran. Adapun rekapitulasi dari review program dan kegiatan tahun lalu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
 RECAPTULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA RPBD DAN
 PENCAPAIAN RENCANA RPBD 1/1 TAHUN 2021 KOTA SERANG

KODE RENCANA	URAIAN/PROGRAM/KELOMPOK	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KELOMPOK	SATUAN	TERTAKUT	KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELOMPOK TAHUN (M-2) TAHUN 2021	TERTAKUT TERPILIH	TERTAKUT DAN MELAKUKAI KINERJA PROGRAM/KELOMPOK DAN		TARGET PROGRAM DAN RENCANA (RENCANA RPBD TAHUN 2021)	PENCAPAIAN MELAKUKAI CAPAIAN RENCANA	
							TARGET RENCANA RPBD TH (M-2) TAHUN 2021	REALISASI RENCANA RPBD TH (M-2) TAHUN 2021		PROGRAM DAN RENCANA (RENCANA RPBD TAHUN 2021)	REALISASI RENCANA (RENCANA RPBD TAHUN 2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.01.2.01.02	Kelembagaan Informasi Bencana Desa/Kelurahan/Kota	Prosedur Kegiatan Penanganan dan Penyelenggaraan Informasi Bencana Alam di Kota Serang	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Rapor Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Promotif risiko informasi kebencanaan pada masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.01.2.01.03	Soalihan, Kemitraan, kolaborasi dan edukasi (KKE) Siswa Bencana Kabupaten / Kota (Per. jms bencana)	Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	300
1.05.01.2.01.06	Program Penanggulangan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan pelaksanaan (kehadapan masyarakat) yang rutin	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.01.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Penyusunan RPBD dan RPDR	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	100
1.05.01.2.02.02	Penyusunan Penetapan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Amatir sebagai RESORON (Rencana Kegiatan)	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.05.01.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyelidikan-Serius Penyelidikan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	100
1.05.01.2.02.04	Penyusunan Rencana Penanggulangan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.05.01.2.02.06	Program Kesiapsiagaan Kawasan untuk Penanggulangan dan Kesiapsiagaan	Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	100%
1.05.01.2.02.07	Penyusunan Peta Bencana Kabupaten / Kota	Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan	Kegiatan	60	60	60	60	60	60	60	100
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Rapor Risiko Bencana Kabupaten (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	100
1.05.01.2.03.04	Kelembagaan Penanggulangan dan Evakuasi Bencana	Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan	TRC	17	17	17	17	17	17	17	100
1.05.01.2.03.02	Respon cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			%	100	100	100	100	100	100	100	100
			%	100	100	100	100	100	100	100	100
			%	100	100	100	100	100	100	100	100
			TRC	17	17	17	17	17	17	17	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.09.01.2.01.01	Penyusunan, pelaksanaan dan Evaluasi Kerjasama Komunitas/Desa	Jumlah kerjasama 5 Desa, untuk dan kerjasama dalam	Dokumen	12	-	12	11	100	100	100	100	100	100	100
1.09.01.2.01.02	Penyusunan /Agenda Pemerintahan dan Evaluasi Kinerja Desa/Kelurahan / Kota	Jumlah paket program untuk kelurahan/kota	paket	350	-	350	350	100	100	100	100	100	100	100
1.09.01.2.01.03	Program Sistem Dasar Penyelenggaraan Desa	Prosentase sistem koordinasi dan regional dalam penyelenggaraan desa	%	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.09.01.2.01.01	Program Sistem Dasar Penyelenggaraan Desa	Jumlah program yang diluncurkan untuk desa penyelenggaraan	Dokumen	0	-	1	1	100	100	100	100	100	100	100
1.09.01.2.01.02	Program Kelengkapan Dokumen Kelengkapan / Kota	Jumlah kelengkapan perangkat yang sesuai terhadap standar	Kelengkapan	4	-	4	4	100	100	100	100	100	100	100
1.09.01.2.01.03	Kejelasan atau terdapat dan ketepatan dalam Penyelenggaraan Desa/Kelurahan / Kota	Jumlah kelengkapan standar OPD di bidang kelengkapan	Kepastian	1	-	1	1	100	100	100	100	100	100	100
2	Urutan kerja yang telah berjalan dengan Program Dasar		%	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.16	Desain Penyelenggaraan Bidang Penyelenggaraan				-									100%
2.16.01	Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keberhasilan pelaksanaan perencanaan dan penyelenggaraan	%	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.16.01.2.01	Penyusunan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan pelaksanaan perencanaan dan evaluasi	%	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ringkasan Materi	Dokumen	1	-	1	1	100	100	100	100	100	100	100
2.16.01.2.01.01		Jumlah Dokumen Rencana	Dokumen	1	-	1	1	100	100	100	100	100	100	100
2.16.01.2.01.01		Jumlah Dokumen Baku dan Penyelenggaraan	Dokumen	2	-	2	2	100	100	100	100	100	100	100
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Dokumen BKA-SKPD	Jumlah bulatan koordinasi operator sistem SKPD pada SKPD	Dokumen	12	-	12	12	100	100	100	100	100	100	100
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen BKA-SKPD	Jumlah Dokumen BKA	Dokumen	1	-	1	1	100	100	100	100	100	100	100
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen BKA-SKPD	Jumlah Dokumen BKA	Dokumen	1	-	1	1	100	100	100	100	100	100	100
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen BKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	1	-	1	1	100	100	100	100	100	100	100
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD	Jumlah Dokumen LKUP	Dokumen	1	-	1	1	100	100	100	100	100	100	100
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Dokumen	12	-	12	12	100	100	100	100	100	100	100
2.16.01.2.01.07		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja OPD	Dokumen	1	-	1	1	100	100	100	100	100	100	100
2.16.01.2.01.07		Jumlah Dokumen Perilaku dan Selengkap Perangkat Daerah	Dokumen	2	-	2	2	100	100	100	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.18.01.2.02.01	Pembelian Caji dan Tanggapan ASK	Jumlah bulat pembelian caji dan tanggapan ASK	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
2.18.01.2.02.02	Konfirmasi dan Penyesuaian Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah bulat konfirmasi dan penyesuaian laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
2.18.01.2.02.03	Konfirmasi dan Penyesuaian Laporan Keuangan Tahunan/Trimester/Desember	Jumlah bulat konfirmasi dan penyesuaian laporan keuangan tahunan/trimester/desember	Dokumen	6	6	6	6	6	6	6	6
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Manajemen (MPO) keuangan pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
2.18.01.2.03.01	Maintenance barang milik daerah pada SKPD	Jumlah bulat pemeliharaan barang milik daerah pada SKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.18.01.2.03.02	Administrasi Ekspedisi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ekspedisi barang milik daerah yang diselesaikan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
2.18.01.2.03.03	Pengelolaan Dana Bersisa Akhir Sekolahnya	Persentase pengelolaan dana bersisa akhir tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.18.01.2.04	Administrasi Dana Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dana perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.18.01.2.05.01	Pengelolaan Kompleks Hibrida Listrik/Pencapaian Barang-baru Kantor	Jumlah bulat pengelolaan kompleks hibrida listrik/pencapaian barang-baru kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
2.18.01.2.05.02	Pengelolaan Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah bulat perawatan dan perbaikan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
2.18.01.2.05.03	Pembelian Perawatan Busak, Tangki	Jumlah bulat pembelian perawatan busak/tangki	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
2.18.01.2.05.04	Pengelolaan Hibah Logistik Kantor	Jumlah bulat pengelolaan hibah logistik kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
2.18.01.2.06.01	Pengelolaan Hibah Cetak dan Pengabdian	Jumlah bulat pengelolaan hibah cetak dan pengabdian	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
2.18.01.2.06.02	Pengelolaan Hibah Riset dan Penelitian	Jumlah bulat pengelolaan hibah riset dan penelitian	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
2.18.01.2.06.03	Pembelian Hibah Riset dan Penelitian	Jumlah bulat pembelian hibah riset dan penelitian	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
2.18.01.2.06.04	Pembelian Hibah Riset dan Penelitian	Jumlah bulat pembelian hibah riset dan penelitian	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
2.18.01.2.06.05	Pembelian Hibah Riset dan Penelitian	Jumlah bulat pembelian hibah riset dan penelitian	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
2.18.01.2.06.06	Pembelian Hibah Riset dan Penelitian	Jumlah bulat pembelian hibah riset dan penelitian	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
2.18.01.2.06.07	Pembelian Hibah Riset dan Penelitian	Jumlah bulat pembelian hibah riset dan penelitian	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
2.18.01.2.06.08	Pembelian Hibah Riset dan Penelitian	Jumlah bulat pembelian hibah riset dan penelitian	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
2.18.01.2.06.09	Pembelian Hibah Riset dan Penelitian	Jumlah bulat pembelian hibah riset dan penelitian	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
2.18.01.2.07	Pengelolaan Hibah Riset dan Penelitian	Jumlah bulat pengelolaan hibah riset dan penelitian	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.18.01.2.07.01	Pengelolaan Hibah Riset dan Penelitian	Jumlah bulat pengelolaan hibah riset dan penelitian	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Tgl	Judul	Uraian	Unit	Jumlah	Waktu	Tempat	Penyaji	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
1	2018.01.2.00.02	Pengadaan Kesehatan (Dosa Operational area Lapangan)		Unit	1							
2	2018.01.2.01.05	Pengadaan Mebel		Unit	6							
3	2018.01.2.01.06	Pengadaan Perawatan dan Perawatan Kesehatan		Unit	4							
4	2018.01.2.01.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor area Lapangan		Unit	4							
5	2018.01.2.01.08	Prosedur Kerja Penyediaan Layanan Pemeliharaan		%	100							
6	2018.01.2.01.01	Penyediaan Item Suku Mampet		Bulan	12							
7	2018.01.2.01.03	Penyediaan Item Koneksi, Jarum Daya Air dan Lain-lain		Bulan	12							
8	2018.01.2.01.04	Penyediaan Alat Pelengkapan Urut Kantor		Bulan	12							
9	2018.01.2.01.04	Pembelian Kertas M800 Dampak Peningkat		Bulan	48							
10	2018.01.2.01.04	Pembelian Kertas M800 Dampak Peningkat		Bulan	0							
11	2018.01.2.01.02	Pembelian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kesehatan Dosa Operational area Lapangan		Bulan	0							
12	2018.01.2.01.02	Pembelian Mebel		Bulan	12							
13	2018.01.2.01.05	Pembelian Perbaikan dan Mebel Lainnya		Bulan	12							
14	2018.01.2.01.09	Pembelian Reklamasi Gedung Kantor dan Lapangan		Unit	1							
15	2018.01.2.01.11	Pembelian Reklamasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor dan Lapangan Lainnya		Bulan	12							



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 12 Tahun 2010 tentang pembentukan dan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang bahwa tahapan kegiatan dalam penanggulangan bencana terdapat 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Pra Bencana
2. Tanggap Darurat bencana, dan
3. Pasca Bencana

Sehingga dalam struktur tersebut terdapat 3 (tiga) tugas pokok dan fungsi utama dalam penanggulangan bencana yaitu :

1. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, dan
3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Untuk lebih jelasnya maka bersama ini kami uraikan tentang pencapaian kinerja pelayanan BPBD Kota Serang tahun 2021 berdasarkan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 bahwa lembaga yang menangani bencana secara nasional adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana bahwa sebagai lembaga yang menangani bencana di daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan fungsi sebagai :

1. Pelaksanaan koordinasi
2. Pelaksanaan komando, dan
3. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang dilaksanakan secara komprehensif dalam arti mulai dari kondisi aman atau pra bencana yaitu dilaksanakannya kegiatan-kegiatan berupa pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat bencana sampai kepada pasca bencana yaitu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam keadaan kondisi aman BPBD Kota Serang melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang potensi bencana yang ada dikota Serang, pemantauan dan informasi potensi bencana alam dan pembekalan secara teknis cara penanggulangan bencana kepada relawan, pengadaan sembako sebagai buffer stock dalam rangka kesiapsiagaan bencana.

Dalam kondisi dimusim hujan, tentu BPBD Kota Serang selalu mengadakan monitoring baik langsung ke wilayah-wilayah



yang rawan bencana banjir maupun monitoring melalui pesawat radio (HT) dan Hand Phone dengan menghubungi relawan-relawan yang ada di wilayah rawan bencana banjir. Dan apabila terjadi bencana seperti banjir di wilayah Kecamatan Kasemen, maka Tim penanggulangan bencana BPBD Kota Serang bersama TRC langsung menuju titik bencana untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan seperti melakukan kaji cepat, evakuasi korban bencana, memberikan bantuan yang diperlukan korban bencana seperti sembako, family kit, obat-obatan, kebutuhan pakaian seperti selimut dan lainnya sesuai kemampuan buffer stock BPBD.

Dalam hal penanganan penanggulangan bencana di Kota Serang dalam perjalanannya masih banyak kekurangan terutama dalam hal sumber daya manusia, perlu diketahui bahwa legalitas personil berupa PNS di BPBD Kota Serang hanya 8 (delapan) orang termasuk kepala pelaksana, sehingga akan sulit dalam penanganan bencana se-kota Serang sesuai dengan harapan warga masyarakat yaitu penanganan yang cepat, tepat, terpadu, terarah.

Adapun tantangan dan peluang dalam pelayanan penanggulangan bencana BPBD Kota Serang adalah sbb :

Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan

1. Mudahnya akses koordinasi baik horizontal dengan OPD terkait maupun vertical dengan BPBD Provinsi dan BNPB



2. Adanya komitmen pendanaan yang memadai dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dari pos belanja tak terduga APBD Kota Serang
3. Adanya komitmen pimpinan dalam penanggulangan bencana
4. Adanya regulasi penanggulangan bencana yang terstruktur.

b. Kelemahan

1. Masih kurangnya sumber daya manusia BPBD Kota Serang dalam penyelenggaraan bencana.
2. Belum adanya gedung kantor sendiri sebagai operasional perkantoran yang representative.
3. Belum optimalnya sinergitas pada saat pelaksanaan tahapan penanggulangan bencana

Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1. Pesatnya perkembangan teknologi dalam menunjang kegiatan dibidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko-resiko bencana
2. Adanya peran serta relawan, ormas dan LSM dalam upaya penanggulangan
3. Adanya peluang peran serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana



b. Ancaman

1. Adanya perubahan iklim global yang menambah intensitas bencana alam di semua wilayah
2. Kompleknya potensi bencana alam, non alam dan bencana sosial di wilayah Kota Serang
3. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan
4. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam pengurangan resiko bencana
5. Semakin berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) di kota Serang

Secara eksternal telah kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini cuaca alam sudah tidak menentu ditambah kondisi hutan yang semakin gundul, RTH dan atau penghijauan berkurang, sarana prasarana wilayah perkotaan yang kurang/tidak tertata dengan baik, rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan dan lunturnya filosofi gotong royong, sehingga bencana banjir terjadi dimana-mana, tentu harus adanya percepatan regulasi untuk menangani kondisi alam seperti itu.

Secara internal tentu harus adanya penguatan terhadap lembaga yang menangani bencana daerah terutama adanya sumber daya manusianya dan sarana dan prasarananya, sehingga sasaran dan strategi penanganan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan baik sesuai harapan masyarakat.



2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan program dan kegiatan seyogyanya berdasarkan kebutuhan bukan berangkat dari suatu keinginan, program dan kegiatan setiap OPD tentu harus tertuang dalam rancangan awal rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kota Serang dengan bersumber dari rancangan awal rencana kerja OPD, yang artinya seyogyanya rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan semestinya sama.

Proses pembuatan rencana kerja program dan kegiatan berawal dari suatu kebutuhan tugas pokok dan fungsi OPD secara komprehensif, mulai dari program dan kegiatan perkantoran sampai kepada program dan kegiatan teknis yang kemudian dikomparasi dengan kemampuan APBD Kota Serang. Program dan kegiatan pada tahun anggaran 2021 ini terdapat penataan program dan kegiatan dibanding tahun anggaran 2020 sebagai bentuk penguatan BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Adapun sebagai gambaran jelasnya program dan kegiatan BPBD Kota Serang tahun anggaran 2021 tersajikan sebagai berikut :

REVIEW TERHADAP BANGUNAN AWAL BERIP TAHUN 2021
KOTA SERANG

NO. 100/2021/KEP/1000/2021

NO	BANGUNAN AWAL BERIP				BANGUNAN BERIP/TAMBAH				KETERANGAN	
	LOKASI	REKORD AWAL BERIP	WAKTU CAPAI	BIAYA TERKAIT	REKORD BERIP/TAMBAH	LOKASI	REKORD AWAL BERIP/TAMBAH	TARGET CAPAIAN		BIAYA TERKAIT
I										
1	Pelayanan Informasi Bencana Kabupaten/Kota	Proses dan Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam di Kota Serang	100 %	571.128.934	Pelayanan Informasi Bencana Kabupaten/Kota	100 %	571.128.934	100 %	571.128.934	
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen peta risiko bencana bentuk pemetaan masalahnya	1 Dokumen	144.910.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota	1 Dokumen	144.910.000	1 Dokumen	144.910.000	
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bencana Bencana Kabupaten / Kota (Per jenis bencana)	Jumlah sosialisasi mengenai pengurangan risiko bencana	2 Kegiatan	632.218.356	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bencana Bencana Kabupaten / Kota (Per jenis bencana)	2 Kegiatan	632.218.356	2 Kegiatan	632.218.356	
II										
1	Pelayanan Peneguhan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Proses dan pelayanan terhadap masyarakat yang rentan terhadap bencana	100 %	626.192.484	Pelayanan Peneguhan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	626.192.484	100 %	626.192.484	
1	Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen RPB Kota Serang Jumlah dokumen RENCANA (Bencana Kontijensi)	0 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Bencana Kabupaten / Kota	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	
2	Pelatihan Peneguhan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah peserta pelatihan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	1 Kegiatan	51.171.000	Pelatihan Peneguhan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	1 Kegiatan	51.171.000	1 Kegiatan	51.171.000	
3	Penyusunan Operasi dan Penyelenggaraan Sistem Peringatan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana evaluasi prosedur yang terencana dampak bencana	68 Unit	0	Penyusunan Operasi dan Penyelenggaraan Sistem Peringatan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota	68 Unit	0	68 Unit	0	

4	Penyediaan Peringatan Peringatan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	orang	0	orang	0
5	Peningkatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	78.175.000	Orang	60	Orang	78.175.000
6	Peningkatan Pasca Bencana Kabupaten / Kota	137.157.585	Kegiatan	3	Kegiatan	137.157.585
7	Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	291.393.000	TRC	17	TRC	393.649.000
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	780.061.300	%	100	%	599.744.000
1	Respon cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	303.450.000	TRC	17	TRC	343.000.000
2	Pencarian, pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	255.601.400	Bulan	12	Bulan	150.670.000
3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	301.009.900 / Kota	paket	500	paket	107.074.000
IV	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	%	100	%	-
1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	-	Dokumen	1	Dokumen	-
2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / Kota	-	Kulturban	4	Kulturban	-
3	Kerjasama antar lembaga dan Komunitas dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	-	Kegiatan	1	Kegiatan	-

V	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Ketercapaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	23.812.000	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Ketercapaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	24.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	010	Jumlah Dokumen Berjeda Istem	1	Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	010	Jumlah Dokumen Berjeda Istem	1	Dokumen	1.000.000
		020	Jumlah Dokumen Rencana	1	Dokumen			020	Jumlah Dokumen Rencana	1	Dokumen	1.000.000
		030	Jumlah Dokumen IKU dan Penetapan Kinerja	2	Dokumen	22.400.000		030	Jumlah Dokumen IKU dan Penetapan Kinerja	2	Dokumen	1.015.000
		040	Jumlah Bulan beroperasi operator sistem SIPD pada SKPD	12	Bulan			040	Jumlah Bulan beroperasi operator sistem SIPD pada SKPD	12	Bulan	21.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	040	Jumlah Dokumen RKA	1	Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	040	Jumlah Dokumen RKA	1	Dokumen	2.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	050	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1	Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	050	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1	Dokumen	2.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	060	Jumlah Dokumen DPA	1	Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	060	Jumlah Dokumen DPA	1	Dokumen	2.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	040	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1	Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	040	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1	Dokumen	2.000.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi SKPD	050	Jumlah Dokumen LKj-IP	1	Dokumen	1.675.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi SKPD	050	Jumlah Dokumen LKj-IP	1	Dokumen	1.675.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	060	Jumlah Dokumen LPPD	1	Dokumen	1.675.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	060	Jumlah Dokumen LPPD	1	Dokumen	1.675.000
8	Evaluasi Laporan Evaluasi Bulanan	060	Jumlah Laporan Evaluasi Bulanan	12	Dokumen	-	Evaluasi Laporan Evaluasi Bulanan	060	Jumlah Laporan Evaluasi Bulanan	12	Dokumen	-
9	Evaluasi Laporan Evaluasi Berjeda OPD	060	Jumlah Laporan Evaluasi Berjeda OPD	1	Dokumen	-	Evaluasi Laporan Evaluasi Berjeda OPD	060	Jumlah Laporan Evaluasi Berjeda OPD	1	Dokumen	-
10	Jumlah Dokumen Profil dan Selayang Pandang Perangkat Daerah	060	Jumlah Dokumen Profil dan Selayang Pandang Perangkat Daerah	2	Dokumen	-	Jumlah Dokumen Profil dan Selayang Pandang Perangkat Daerah	060	Jumlah Dokumen Profil dan Selayang Pandang Perangkat Daerah	2	Dokumen	-
VI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah ketercapaian dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	1.340.314.094	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah ketercapaian dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	1.015.968.417
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	010	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	1.179.664.461	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	010	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	1.000.431.387

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen	1.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	6	Dokumen	50.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	6	Dokumen	50.500.000
VII	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rencana SIPD Keuangan	12	Bulan		Rencana SIPD Keuangan	Rencana SIPD Keuangan	12	Bulan	21.000.000
1	Perencanaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perencanaan Dokumen Barang Milik Daerah	100	%	18.877.700	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perencanaan Dokumen Barang Milik Daerah	100	%	50.800.000
1	Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Barang Milik Daerah yang disusun	12	Bulan	18.877.700	Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Barang Milik Daerah yang disusun	12	Bulan	50.000.000
VIII	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perencanaan pengalihan jabatan pegawai	100	%	72.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perencanaan pengalihan jabatan pegawai	100	%	38.100.000
1	Pengalihan Paksiar Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paksiar dinas	27	Set	72.000.000	Pengalihan Paksiar Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paksiar dinas	27	Set	20.400.000
1	Pengalihan Paksiar Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paksiar dinas hari-hari tertentu	33	Set		Pengalihan Paksiar Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paksiar dinas hari-hari tertentu	33	Set	17.700.000
IX	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perencanaan anggaran	100	%	303.990.845	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perencanaan anggaran	100	%	271.840.349
1	Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	5.501.700	Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	4.501.700
2	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	Bulan	40.601.000	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	Bulan	22.501.000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat-alat Rumah Tangga	2	Unit		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat-alat Rumah Tangga	2	Unit	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan material dan mutasi Pegawai	12	Bulan	42.600.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan material dan mutasi Pegawai	12	Bulan	50.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan pengiriman	12	Bulan	28.501.987	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan pengiriman	12	Bulan	28.579.000

6	Penyediaan Bahan Baku dan Prasarana Persekolahan	000	12	Bulan	45.147.833	Penyediaan Bahan Baku dan Prasarana Persekolahan	000	12	Bulan	14.779.513
7	Facilities Kunjungan Ternu	000	12	Bulan		Facilities Kunjungan Ternu	000	12	Bulan	
8	Pengembangan Rupa Kordinasi dan Komunikasi SKPD	000	12	Bulan	181.419.500	Pengembangan Rupa Kordinasi dan Komunikasi SKPD	000	12	Bulan	187.498.500
9	Pengadaan Jasa Penyulung Usaha Persekolahan Daerah	000	100%	%	191.309.683	Pengadaan Jasa Penyulung Usaha Persekolahan Daerah	000	100%	%	213.661.483
1	Penyediaan Jasa Sertai Masyarakat	000	12	Bulan	1.000.000	Penyediaan Jasa Sertai Masyarakat	000	12	Bulan	1.001.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	000	12	Bulan	34.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	000	12	Bulan	34.000.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	000	12	Bulan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	000	12	Bulan	39.600.000
		000	12	Bulan			000	12	Bulan	40.000.000
		000	12	Bulan	453.509.433		000	12	Bulan	512.200.000
		000	12	Bulan			000	12	Bulan	11.200.000
		000	12	Bulan			000	12	Bulan	13.200.000
		000	12	Bulan			000	12	Bulan	13.000.000
		000	3	Event			000	3	Event	41.000.000

Penelitian tentang Monev Dampak Peningkatan Struktur Pemerintahan Daerah	Penelitian tentang Monev dampak yang diharapkan	100	%	454.970.000	Pembelian Jasa Penelitian, Biaya Penelitian, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional dan Lainnya	12	Bulan	-
1	Jumlah Penelitian rutin/berkala berdasarkan data operasional kota esport dan kota dua	12	Bulan	417.000.000	Penelitian Jasa Penelitian, Biaya Penelitian, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	12	Bulan	417.000.000
2	Jumlah bulan penelitian rutin/berkala mendatang	12	Bulan	-	Pembelian Mebel	12	Bulan	-
3	Jumlah Penelitian rutin/berkala perbulan gedung kantor	12	Bulan	15.000.000	Perubahan Perbulan dan Masa Lainnya	12	Bulan	15.000.000
4	Jumlah gedung yang disehars/direhabilitasi	1	Tahun	21.000.000	Perbaikan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Tahun	21.000.000
5	Jumlah Penelitian rutin/berkala per-tglapan gedung kantor	12	Bulan	-	Perbaikan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perumahan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Bulan	-



2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan OPD bisa berasal dari 2 (dua) arah yaitu top down dan bottom up, program dan kegiatan yang berasal dari system top down itu karena OPD mengadakan program dan kegiatan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi dari OPD itu sendiri dan biasanya kegiatan tersebut persentasenya lebih besar namun mengarah pada kepentingan masyarakat. Disamping itu juga ada program dan kegiatan dengan system bottom up yaitu hasil usulan masyarakat melalui musbangkel kemudian ditindaklanjuti dengan musrembang tingkat kecamatan dan musrembang tingkat kota, namun tetap didasarkan pada tugas pokok dan fungsi OPD tertentu.

Khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang juga mengakomodir setiap usulan dan kebutuhan dari masyarakat, terlepas melalui musrembang maupun hasil monitoring lapangan Tim BPBD. Dari usulan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan sembako ketika tanggap darurat bencana terjadi, sehingga korban bencana akan kebutuhan dasar dipenampungan sementara terpenuhi dan adanya pelatihan serta sosialisasi mengenai penanggulangan kebencanaan, yang diharapkan bertambahnya pengetahuan masyarakat dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana .



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan BNPB tahun 2015-2020 adalah hasil dari identifikasi dan kajian atas Sembilan agenda prioritas RPJMN yaitu prioritas dalam perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang disebut NAWA CITA. Berkaitan dengan penanggulangan bencana secara implisit tersirat pada nawa cita yang pertama dan ketujuh yaitu :

1. **Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.**
2. **Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik.**

Penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana dilakukan *untuk melindungi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang beresiko tinggi*. Kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam dan meningkatnya frekuensi kejadian bencana, memerlukan upaya antisipasif untuk mengurangi atau meminimalkan dampak kerugian ekonomi akibat bencana dimasa datang. Sehubungan dengan itu, arah kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2020 diarahkan untuk mengurangi

resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional 2015-2020 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2020 salah satunya adalah *Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim*. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup, mengurangi resiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD

T u j u a n

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pelayanan penanggulangan bencana



2. Meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara professional
3. Meningkatkan mutu pelayanan petugas dan relawan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terarah dan terpadu.
4. Adanya keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

SASARAN

Adapun sasaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun 2021 adalah sumber daya manusia (aparatur) yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang terutama para pejabat struktural yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana peraturan daerah Kota Serang nomor 12 tahun 2010 tentang pembentukan dan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Para pejabat Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang harus mampu menjabarkan tugas dan fungsinya serta melaksanakannya secara profesional dilapangan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai serta anggota/pelaksana yang handal dan trampil.

3.3. Program dan kegiatan

Banyak faktor dan pertimbangan yang mempengaruhi dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan tahun anggaran 2021 di




Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang, diantaranya adalah :

1. Penataan dan penguatan dalam bidang sekretariat BPBD
2. Penguatan dalam bidang sumber daya manusia
3. Penguatan informasi dan teknis penanggulangan bencana bagi aparatur dan relawan penanggulangan bencana
4. Penguatan penanggulangan bencana secara komprehensif mulai dari pra bencana sampai kepada pasca bencana.

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun anggaran 2021 berdasarkan perencanaan awal terdiri dari 10 (sepuluh) Kegiatan dengan 32 (tiga puluh dua) Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Kategori	Sub-kategori	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
1.000.000.000.000	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara
1.000.000.000.000	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara	Saluran Perantara

Kepala Kantor
 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

 Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana.

Output rencana kerja BPBD Kota Serang adalah program tahunan BPBD kota Serang yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program BPBD kota Serang. Rencana kerja BPBD kota Serang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021 berfungsi juga sebagai sarana peningkatan kinerja BPBD kota Serang. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf BPBD kota Serang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.

Rencana Kerja (Renja) BPBD tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat BPBD kota Serang selama kurun waktu satu tahun. Rencana kerja BPBD disamping untuk penyusunan rencana kerja jangka pendek kota Serang juga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) BPBD tahun 2021.



Adapun fungsi dari renja tahun 2021 ini sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2020 bagi BPBD, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian perubahan rencana kerja (Renja) BPBD tahun 2021 ini kami susun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 .

Serang, 15 September 2021
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SERANG

DIAT HERMAWAN, SST, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19760426 200112 1 002